

BAB IV

PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK KERAJAAN ARAB SAUDI TERHADAP KERAJAAN ARAB QATAR (2010-2017)

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pertimbangan keamanan internal dan regional Kerajaan Arab Saudi, serta kemandirian ekonomi Kerajaan Arab Qatar.

Menurut sebuah buku pengantar studi hubungan internasional teori dan pendekatan yang ditulis oleh Robert Jackson dan George Sorensen menjelaskan bahwa salah satu nilai dasar dalam sebuah negara adalah ketertiban dan keadilan. Dalam praktiknya setiap negara tentunya hidup saling berdampingan guna memenuhi kepentingan negaranya masing-masing, sehingga perlunya menciptakan ketertiban internasional dalam pencapaiannya (Sorensen, 2014). Akan tetapi meskipun kedua negara memiliki kepentingan satu sama lain yang mana sebelum pemutusan hubungan diplomatik, Arab Saudi adalah salah satu mitra bagi Qatar untuk mengimpor sebagian makannya (Brinded, 2017). Maka hal tersebut menggambarkan bagaimana kedua negara yang sebelumnya memiliki hubungan diplomatik yang baik akan tetapi di bulan Juni 2017 lalu memutuskan hubungan diplomatik.

A. Pertimbangan Keamanan Internal dan Regional Kerajaan Arab Saudi

Kejadian pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi di tahun 2017 berawal pada 23 Mei 2017, warga Arab dan sejumlah negara Teluk dikejutkan dengan adanya berita di sebuah situs Al Arabiya dan laporan berita di *Sky News Arabic*. Berita tersebut mengabarkan bahwa Emir pemimpin negara Qatar memuji Iran sebagai kekuatan regional yang penting. Tindakan ini bagi Arab Saudi merupakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Qatar, karena sebelumnya di tahun

2014 Qatar telah berjanji untuk menyesuaikan kebijakannya dengan Arab Saudi. Bagi Arab Saudi kebijakan regional Iran merupakan sebuah ancaman bagi negaranya (Roll, 2017).

Selain itu, dalam berita tersebut juga dijelaskan bahwa Qatar mendukung organisasi ekstremis seperti Ikhwanul Muslimin. Qatar yang menjadikan negaranya sebagai tempat untuk menampung kelompok tersebut justru bagi Arab Saudi Ikhwanul muslimin merupakan organisasi teroris dan kelompok yang dapat mengganggu stabilitas keamanan politik di kawasan Timur Tengah (Roll, 2017). Pandangan Arab Saudi tersebut disebabkan peristiwa *Arab Spring* yang terjadi beberapa tahun silam yang menuding jika terjadinya perubahan rezim dan jatuhnya presiden Mesir, Husni Mubarak di tahun 2011 akibat adanya peranan penting dari eksploitasi perubahan yang dilakukan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Berbeda dengan Qatar yang menanggapi peristiwa tersebut merupakan bentuk dari demokrasi yang dilakukan oleh rakyat Mesir (George Doumar, *Crisis In The Gulf Cooperation Council Challenges and Prospect*, 2017).

Dalam sebuah buku Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah yang ditulis oleh Dr. Sidik Jatmika, Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri di Mesir pada bulan Maret 1928 yang didirikan oleh Hassan al-Banna. Organisasi ini memiliki pandangan jika Islam adalah agama yang umum dan menyeluruh, bukan agama yang sekedar mengajarkan ibadah ritual (salat, puasa, haji, zakat, dll.) saja. Selain itu, ajaran Shufi yang melekat memberikan peranan pada organisasi ini, sehingga menolak adanya penjajahan dan monarki yang pro terhadap barat. Kemudian dalam perpolitikan yang terjadi di beberapa negara, organisasi Ikhwanul muslimin mengikuti jalannya demokrasi sebagai bentuk dari hasil pemikirannya. Namun, meskipun demikian Ikhwanul Muslimin tetap mengikuti perkembangan teknologi sebagai bentuk organisasi Islam moderat agar dapat diterima oleh segala lapisan dan pergerakan. Ikhwanul Muslimin juga sebuah organisasi Islam yang menegaskan jika

Islam harus mengikuti sesuai perkembangan zaman (Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, 2014).

Kemudian, berita tersebut juga mengabarkan jika Qatar mendukung Hamaz yang mana bagi Arab Saudi Hamaz merupakan ancaman bagi negara-negara Teluk. Bagi Arab Saudi dan sejumlah negara-negara Teluk, Hamaz yang dulunya merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin kini telah memisahkan diri dianggap mengancam keamanan Arab Saudi dan wilayah Teluk lantaran Hamaz sebuah organisasi yang dipandang sebagai teroris (George Doumar, Crisis In The Gulf Cooperation Council Challanges and Prospect, 2017).

Berita tersebut juga mengabarkan jika Qatar mendukung Hizbullah (AlJazeera Centre for Studies, 2017). Dimana Hizbullah merupakan sebuah organisasi teroris yang ditetapkan oleh Liga Arab saat menggelar pertemuan di Mesir. Pertemuan tersebut dilakukan atas rencana Arab Saudi. Penetapan Hizbullah sebagai organisasi teroris didasarkan atas pandangan Arab Saudi dan sejumlah anggota negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab terkait dengan serangan rudal balistik yang terjadi pada 4 November 2017 di Bandara Internasional Riyadh yang dilakukan oleh Hizbullah dan Iran (Michaella, 2017).

Namun dengan beredarnya pemberitaan tersebut Qatar memberi tanggapan bahwa tudingan yang diberitakan oleh media tersebut tidak berdasar, Qatar juga berargumen jika *Qatar News Agency* (QNA) telah di retas. Berita yang berisi sejumlah tudingan terhadap negara Qatar tersebut terus berjalan, terutama di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pada waktu yang bersamaan juga sebuah akun media sosial menteri luar negeri Qatar turut di retas, dan pelaku tersebut justru kemudian menyebarkan berita bahwa Qatar telah memutuskan hubungan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab beserta Mesir. Namun dalam kasus ini tidak ada satu pun media yang memberitakan bahwa Qatar telah memberikan klarifikasi jika

Qatar tidak melakukan tindakan tersebut (AlJazeera Centre for Studies, 2017).

Terlepas dari beredarnya pemberitaan terkait dengan dukungan Qatar terhadap kelompok ekstremis dan Iran, pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017 disebabkan oleh dukungan Qatar kepada Iran mengenai pengayaan uranium di Iran. Yang mana perbuatan tersebut dikecam oleh negara-negara Arab karena ini merupakan bentuk ambisi Iran terhadap program nuklirnya yang dapat membahayakan keamanan di kawasan Arab. Kedekatan Qatar terhadap Iran ini justru membangkitkan emosi bagi Arab Saudi, sehingga menimbulkan krisis diplomatik pada Arab Saudi kepada Qatar. Pernyataan ini dijelaskan oleh ketua Penelitian dan Publikasi dari Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi (Suastha, 2017).

B. Kemandirian Ekonomi Qatar

Putusnya hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017 disebabkan Qatar yang telah mengimplementasikan nilai strategis dalam kebijakan luar negerinya, yakni dengan melihat keuntungan apa yang akan Ia peroleh. Selain itu adanya kemandirian yang dilakukan oleh negara Qatar yang mana seharusnya tidak dapat dilakukan oleh negara kecil, serta keaktifan Qatar dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) (George Doumar, *Crisis In The Gulf Cooperation council Challenges and Prospect* , 2017).

Selanjutnya, menurut pengajar fakultas ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, pemicu putusnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar juga disebabkan rasa kekhawatiran negara Teluk yang termasuk Arab Saudi anggotanya, memandang jika Qatar merupakan ancaman bagi mereka yang memiliki potensi strategis. Beliau juga mengatakan meskipun Qatar merupakan negara yang relatif kecil namun Qatar memiliki daya tarik dalam segi geografi, geologi dan demografi. Selain itu beliau

menambahkan jika potensi strategis yang dimiliki Qatar diantaranya adalah dari sisi pendapatan, pendidikan dan sumber daya alam yang dimilikinya. Potensi tersebut merupakan hasil dari inovasi Qatar yang kini dinilai memiliki perkembangan yang cepat. Kemudian, Berly menjelaskan bahwa Qatar tidak hanya mengandalkan sumber daya alam mereka, melainkan dari sektor penerbangan dan pariwisata yang mereka bangun dan kini menjadi sektor unggulan. Gaya Qatar yang seperti ini justru di nilai menjadi ancaman bagi Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk (Rahayu, 2017).

Penjelasan lainnya juga diberikan oleh pengajar FISIP UIN Jakarta, Ali Munhanif berkaitan dengan pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi pada Arab Saudi terhadap Qatar bahwa Qatar sebagai negara kecil memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian, adanya perbedaan pandangan terhadap kedua negara yang menimbulkan ancaman bagi Arab Saudi. Perbedaan pandangan tersebut dilihat saat ketidaksetujuan Qatar terhadap invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Penyebab lainnya yaitu adanya rasa keinginan menjadi super power di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Qatar yang mampu mendorong terjadinya perubahan politik internalnya yang membuat negaranya berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Oleh sebab itu kedekatan Qatar terhadap Iran dan Hamas di Gaza tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung terjadinya reformasi terhadap keduanya. Bahkan tidak hanya itu, penyebab lainnya adalah sifat keterbukaan Qatar jika dibandingkan dengan negara-negara Teluk lainnya menjadikan negaranya mudah diterima oleh negara-negara Eropa. Hal inilah yang dianggap ancaman bagi stabilitas kawasan Timur Tengah oleh Arab Saudi karena pertumbuhan ekonomi dan kemandirian Qatar yang nantinya akan mengurangi ketergantungannya terhadap negara-negara Teluk lainnya, sehingga apabila pemutusan hubungan diplomatik tersebut dilakukan akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara Qatar (Rahayu, 2017).